

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Wibowo dkk, Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (Bandung: CV. Media Sains Indonesia: 2020)
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan* (Binarupa Aksaram 1996).
- Chaerudin Dkk, (2008). Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm.2.
- Ermansjah Djaja., Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa.
- Dora Amalia (Pemimpin Redaksi), 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta hlm.880.
- Feni Rita Fiantika, dkk. 2002, Metode Penelitian Kualitatif, (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI)
- Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok : Prenada Media Grub, 2018).
- Mario Randy Lengkong, Kewenangan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015, h. 163.
- Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Prenada Media Grub, Jakarta, 2021).
- Prof. Dr. Sugiyono, Dr. Puji Lestari, M.Si, 2021, Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Text, Cara Menulis Artikel Untuk Jurnal Nasional dan Internasional), (Bandung: Alfabeta, 2021).

- R. Tresna, Komentari HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Wijayanto & Ridwan Zachrie, Korupsi Mengeropsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan, Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: 2009) Hlm. 6
- Wijayanto, (2009). Memahami Korupsi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal.22

B. Hasil Penelitian

- Agustina, S. (2015). IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503-510. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Ahmad Syaiki dkk. (2022). CORRUPTION: NOT A TABOO FOR INDONESIANS. *Jurnal Kajian Hukum*, Universitas Janabadra, Vol 7
- Badjuri, Achmad. (2011). Peranan KPK Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Universitas Jendral Soedirman. No. 1. Vol. 18.
- Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia (Supriyadi Widodo Eddyono ed)*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) MaPPI FHUI “Aliansi Nasional Reformasi KUHP” (2016), hal. 2
- Dudy Heryadi dan Denny Indra Sukmawan. (2023). *Mengoptimalkan koordinasi dan supervise antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. 2(9), hlm. 215.
- Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2).
- Dwina Putri., *Korupsi dan Prilaku Koruptif*, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu : Sumatera Utara.

- Eka Yuliasuti, “Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, (2020), AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah, hal. 12-13
- Hibnu Nugroho. (2013). *Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 3(13), hlm. 7.
- Jeane Neltje Saly. (2004). Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tipikor. Jurnal Legislasi Indonesia, No.1 vol. 4, hlm. 14.
- Mahalia Reunussa, Dkk. (2024), Supervisi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengambilalihan Perkara. *MATAKAO Corruption Law review*, Universitas Pattimura, 2 (2), hlm. 144.
- Rudy Cahya Kurniawan. (2018). Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Kepolisian. 3(12), hlm. 29
- Sahuri Lasmadi. (2010). *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
- Sholahuddin, Umar. (2007). Kewenangan Supervisi KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah. Jurnal Yustitia. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004. Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia).
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

D. Lain-lain

Indonesia Corruption Watch. (2013). Koordinasi-Supervisi KPK Belum Berjalan Maksimal. (*antikorupsi.org*)
<https://www.antikorupsi.org/id/article/koordinasi-supervisi-kpk-belum-berjalan-maksimal> (Diakses pada 20 April 2025)

Kejaksaan Republik Indonesia – Kejaksaan Agung Puspenkum Kejagung, Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Bahas Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Impor Nasional LPEI <https://story.kejaksaan.go.id/tag/korupsi-lpei>
 Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Penerangan Hukum, (<https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-agung-serahkan-penyidikan-perkara-tindak-pidana-korupsi-penyelenggaraan-pembiayaan-ekspor-lpei-kepada-kpk-181423-mvk.html?screen=2>)

Kumparan News, *Kejagung Sangkal KPK soal Ego Sektoral: Sebaiknya Alex Marwata Lihat Fakta Dulu*,
<https://kumparan.com/kumparannews/kejagung-sangkal-kpk-soal-ego-sektoral-sebaiknya-alex-marwata-lihat-fakta-dulu-2339hC64AoV>, 4 Maret 2025.

Baca artikel detiknews, "Sri Mulyani Lapor Kasus LPEI ke Kejaksaan tapi KPK Usut Dulu" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7250937/sri-mulyani-lapor-kasus-lpei-ke-kejaksaan-tapi-kpk-usut-dulu?page=1>.

Pasha Yudha Ernowo, KPK Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi LPEI dari Kejagung untuk Optimalisasi Pemulihan Aset
<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/861616/kpk-ambil-alih-penanganan-kasus-korupsi-lpei-dari-kejagung-untuk-optimalisasi-pemulihan-aset> (Diakses Pada 25 Juli 2025).